

## **REKRUTMEN DAN KADERISASI DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KOTA PADANG**

**Resti Mutia Azri**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas,  
Email : [Resti.azri@gmail.com](mailto:Resti.azri@gmail.com)

### **Abstrak**

Kondisi perkembangan dan dinamika politik di Indonesia suara PKS berkembang baik pada Pemilu 2014 mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Keberhasilan PKS pada lingkup nasional juga tentu hasil kuatnya basis kader yang berhasil menduduki jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif diberbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat keberhasilan PKS di tandai dengan kemenangan pemelihan kepala daerah, terutama di Kota Padang. Di Kota Padang dengan mayoritas muslim menjadikan PKS sebagai partai islam yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Dengan perolehan suara walikota dan wakil walikota Padang pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan data yang diperoleh dilapangan yang disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang Rekrutmen dan Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang.

**Kata Kunci:** Sistem Rekrutmen; Kader Partai PKS ; Pola Kaderisasi ; Dewan Perwakilan daerah ; Partai Keadilan Sejahtera

### **Abstract**

*The condition of development and political dynamics in Indonesia PKS voice develops well at election 2014 get 8,480,204 votes or 6.79 percent. PKS's success in the national sphere is also certainly the result of a strong cadre base that successfully occupied political offices both legislative and executive in various regions, including in West Sumatra. West Sumatra's freedom of PKS is marked by the victory of regional head, especially in Padang City with the majority of Muslims make PKS as an interesting Islamic party to follow its development. With the vote of mayor and deputy mayor of Padang in 2013. This research uses qualitative research methods with descriptive type. Data collection techniques are interviews and documentation using purposive sampling. Data analysis using a descriptive method, namely with data obtained in the field compiled systematically and presented in a descriptive manner, so as to give an overview of the kaderization system of the regional Board of Trustees (DPD) Justice Party Prosperous (PKS) Padang City.*

**Keywords:** Recruitmentary System; MCC Party Cadres ; Kaderization Pattern ; Regional Representative Council ; Prosperous Justice Party

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara modern perkembangan partai politik sangat signifikan. Berbagai macam partai politik tumbuh dan berkembang. Model antara satu partai dengan partai lainnya tentu saja beraneka ragam pula. Hal ini mendorong para ahli kepartaian mencoba melakukan pengelompokan-pengelompokan atau melakukan klasifikasi terhadap berbagai jenis partai politik dan kemudian menggolongkan dalam satu jenis atau satu golongan tersendiri. Mariam Budiarjo menyatakan klasifikasi partai dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.

Pertama, Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Kedua, partai kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia mulai bermunculan partai dengan ideologi agama terutama partai Islam. Islam melihat kebijakan tentang semua ukuran yang serupa dengan promosi kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang mengganggu kesatuan. Karena sebuah partai politik seperti itu hanya menghadirkan partisipasi sebahagian daripada masyarakat, maka partai politik cenderung kepada pemilahan masyarakat kedalam berbagai kelompok. Partai-partai Islamis telah banyak memperoleh perhatian intelektual selama dua dasawarsa terakhir. Partai Islam yang dimaksud disini adalah partai-partai yang secara eksplisit mengklaim Islam sebagai ideologi mereka dan/atau partai yang memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi atau kelompok Islam. Partai Islam yang secara tegas mencantumkan Islam sebagai azas partai ada tiga yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Hal yang menarik untuk kemudian diteliti ialah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota,

kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah satu diantara banyak partai baru yang memiliki ideologi agama (Islam) yang mampu mengembangkan sayapnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa dipahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka *setting* politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam.

Secara teoritis, rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi- fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai atau tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki parpol adalah fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen politik merupakan seleksi, pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan di sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam rekrutmen politik, parpol umumnya memiliki cara sendiri dalam perekrutan calon anggota. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan terorganisir secara sistematis oleh PKS dilakukan secara rutin, dengan harapan bahwa peserta-peserta baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Menurut Mujani dan Liddle mengenai partai-partai Islam dan demokrasi juga menunjukkan bahwa sejauh ini PKS melakukan “strategi dua jalur (*double-track strategy*), dengan memperluas jejaring kader melalui rekrutmen baru di kampus-kampus sambil terus memperluas jangkauan pesannya melalui partisipasi politik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pengkaderan di kampus-kampus sangatlah penting karena selain berdakwah dikampus, juga mencari bakat-bakat mahasiswa yang memiliki kognitif yang baik untuk di rekrut kedalam partai nantinya.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan rekrutmen cabang PKS di kota lain, Kota Padang juga menerapkan hal yang sama, dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama yang

ada di tingkat lokal. PKS Kota Padang menggunakan motif opera di Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al- da"wah al-fardhiyyah*), bentuk pendekatan orang per-orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon-calon kader yang akan direkrut tersebut akan diajak untuk berpartisipasi dalam serangkaian forum keagamaan dan pelatihan yang diorganisir oleh PKS seperti *usrah* (keluarga) atau *halaqah* (kelompok studi terbatas) atau *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukharyam* (*camping*), *daurah* (pelatihan intelektual dan *workshop* Islami), *nadwah* (seminar) dan seterusnya. Harapannya adalah setiap peserta baru akan saling mengenal (*ta"aruf*), memahami (*tafahum*), dan mendukung (*tafaul*). Yang kedua adalah pola rekrutmen instusional (*al-da"wah al-.,amma*). Ada berbagai bentuk rekrutmen institusional yang bisa melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS yang bekerjasama dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Tujuan didirikannya PKS, sebagaimana tertuang dalam AD/ART adalah "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". PKS menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan berates suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Karenanya pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, yang memisahkan agama dari negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa Muslim.

PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Meskipun hanya sekitar satu tahun setelah deklarasi (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti Pemilu tahun 1999. Dalam Pemilu 2004 sampai dengan tahun 2009, PKS mampu meningkatkan sejumlah suara yang cukup signifikan.

Dari tahun 1999 partai ini memperoleh suara 1,36 persen, Pemilu 2004 memperoleh suara 7,34 persen, Pemilu 2009 memperoleh suara 7,88 persen. Manajemen sistem perekrutan dilakukan dengan wadah yang disebut dengan *tarbiyah*. *Tarbiyah* ini merupakan salah satu metode dalam perekrutan kader. Partai yang karena alasan *electoral threshold* berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Keberhasilan PKS pada lingkup nasional juga tentu hasil kuatnya basis kader yang berhasil menduduki jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif diberbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Sumatera Barat keberhasilan PKS di tandai dengan kemenangan pemelihan kepala daerah, terutama di Kota Padang. Di Kota Padang dengan mayoritas muslim menjadikan PKS sebagai partai islam yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Dengan perolehan suara walikota dan wakil walikota Padang pada

tahun 2013 sebanyak 148.864 suara atau 50,29% dan di tahun 2018 212.526 suara atau 62,92%. (Lihat Tabel 1.1 dan 1.2) Selanjutnya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat dengan terpilihnya Irwan Prayitno selama dua periode dengan perolehan suara 657.763 suara atau 32,63% pada tahun 2010 dan 1.175.858 suara atau 58,62% pada tahun 2015 sangat memperlihatkan eksistensi PKS sebagai partai Islam yang baru dalam kancah partai politik.

Terjadinya kenaikan dan peningkatan perolehan suara yang signifikan untuk jumlah kursi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para caleg dan kandidat yang diusung, kader partai simpatisan dan dukungan masyarakat yang berpihak kepada PKS. Seperti yang disampaikan oleh Muhidi;

“...Bagi PKS Kota Padang yang menjadi acuan keberhasilan dakwahnya dalam bidang politik, karena di Kota Padanglah, ada persebaran kader secara merata untuk ditingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dengan demikian bisa diukur secara akurat tingkat partisipasi dan kontribusi kader dalam memenangkan pileg”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Muhidi menekankan bahwa keberhasilan PKS dalam mencapai perolehan suara yang cukup tinggi tidak terlepas dari peran kader PKS. Sembari demikian kader PKS direkrut berdasarkan sistem kaderisasi yang sudah terbangun dengan baik dengan sehingga PKS mendapatkan kader-kader terbaik. Kenyataan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Arnedi yarmen;

“...Bahwa kader PKS di Kota Padang direkrut melalui kalangan cendekiawan seperti dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai bersih, taat beragama dan merespon proses reformasi.”

Disamping itu PKS juga melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan berafiliasi melalui organisasi kemasyarakatan tertentu. Kegiatan pengenalan partai dimulai dengan pemberian pengajian-pengajian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kader PKS;

“...Sebagai partai dakwah, PKS mencirikan segala kegiatannya berbasis pengajian atau syiar Islam. PKS sangat berkepentingan merekrut sekaligus mengkader calon-calon pemimpin yang tangguh. PKS beranggapan bahwa berpolitik itu adalah bagian dari dakwah. Oleh sebab itu dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap PKS, kami sering melakukan pengajian-pengajian yang diselenggarakan bekerjasama dengan ormas-ormas, sekolah atau kampus-kampus. Tetapi pada tahap ini PKS tidak melibatkan politik secara kelembagaan, PKS mendekati para pihak yang “sepaham” dengan pola dakwah dan pengkaderan partai ini. Dengan cara yang demikian memberikan kemudahan bagi pendakwah PKS untuk memasuki Institusi-Institusi tersebut”.

Dari penjelasan Muhidi di atas selaku Ketua DPD PKS Kota Padang periode 2010-2015, dapat diasumsikan bahwa sistem pengkaderanlah yang menjadi kekuatan PKS sebagai partai kader. Hal ini dapat dilihat dari pola rekrutmen kader-kader baru yang merupakan suatu bentuk pendekatan per-orang dengan komunikasi personal secara langsung. Seperti halnya kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan untuk menumbuhkan semacam solidaritas baru berdasarkan kepercayaan dan komitmen yang sama. Kegiatan seperti ini tentunya nanti diharapkan akan terlaksana dengan baik untuk menjadikan kader-kader baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Selain itu beliau juga menegaskan bahwa PKS tidak melibatkan politik secara kelembagaan, ini berarti dengan memberi pelayanan sosial PKS sukses memberi gambaran yang berbeda dibanding partai-partai lain. Kegiatan pelayanan sosial yang mereka lakukan didukung sepenuhnya oleh hal-hal yang nyata dan bermanfaat. Sehingga nantinya dapat menjadikan nilai-nilai dan syari'ah Islam dalam negara sebagai jalan keluar untuk membuka diri dengan bekerja dalam sistem politik yang ada tanpa mengabaikan pluralitas bangsa. Dengan merealisasikan ajaran agama dan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur nantinya tentu PKS akan menjadi lembaga yang bisa mendapat dukungan publik secara luas.

Hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yang mana bertujuan untuk mengetahui sistem kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Dan juga untuk melihat program mereka dalam melakukan kaderisasi sehingga memiliki kader yang berkualitas, militan dan loyal. Sehingga memiliki jumlah kader yang tersebar ditingkat kelurahan dan kecamatan dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih terhadap Partai. Adapun fokus penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Sistem Kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang dalam meningkatkan jumlah suara dalam Pemilu Legislatif ?

### **Gerakan Tarbiyah Sebagai Basis Gerakan Politik**

Tarbiyah, dalam definisi Muhammad Quthb dalam Manhaj Tarbiyah Islamiyah adalah "Seni Membentuk Manusia" (Fannu Tasykilil Insan). Anis Matta mengartikan makna Tarbiyah sebagai pendidikan. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa Gerakan Tarbiyah atau gerakan pendidikan adalah gerakan dalam membentuk, mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, siswa ataupun orang-orang yang kita tuju dalam kepentingan dakwah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan pribadi atau masyarakat, pendidikan (tarbiyah) bisa dipastikan menduduki posisi yang sangat penting. Sebab melalui proses pendidikan pribadi seorang

---

<sup>1</sup>Lihat: <https://id.linkedin.com/pulse/pks-implementasi-politik-gerakan-tarbiyah-indonesia-dan-hasreiza->, diakses pada tanggal 19 Juli 2019, pukul 21.00 WIB

dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sesuai yang diharapkan. Tarbiyah dapat membentuk kepribadian seseorang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya sehingga menjadi kepribadian yang sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam.

Ciri khas gerakan tarbiyah ini adalah membentuk halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) kecil yang terdiri dari lima hingga dua belas orang anggota (mutarabbi) dibimbing oleh seorang murabbi bahkan dalam realisasinya satu atau dua orang anggota pun jadi untuk dikader dan dibina sehingga memiliki wawasan keislaman yang kuat. Contoh lainnya dari proses kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh PKS yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan/Daurah. Dari berbagai jenis daurah tarbiyah (sarana untuk membekali peserta tarbiyah dengan pengalaman untuk pengembangan keahlian dan pengetahuan), terdapat daurah yang merupakan kegiatan sosial-politik misalnyadaurah penyelenggaraan/ pengawasan pemilu dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Badan Desa, LSM).<sup>2</sup>

Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya.<sup>3</sup>

Kegiatan tarbiyah, sebagai wadah dan sarana kaderisasi PKS dapat dikatakan sebagai sebuah proses sosialisasi politik keagamaan karena dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, baik sebelum dan setelah berdirinya PKS, memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan orientasi politik disamping mendapatkan pengetahuan agama.<sup>4</sup> Misalnya, beberapa prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin yang disosialisasikan dalam gerakan tarbiyah adalah Islam merupakan ajaran bersifat totalitas yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Dalam ungkapan yang sering digunakan; Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa dawlah*) yang artinya Islam menolak sekularisme.

### **Pelebagaan Partai Politik**

Ada beberapa pemikiran tentang pelebagaan partai politik, salah satunya pemikiran Samuel P. Huntington. Huntington mendasari pemahaman pelebagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (*political order*), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik,

---

<sup>2</sup>Ibid, *pks-implementasi-politik-gerakan-tarbiyah-indonesia-dan-hasreiza*

<sup>3</sup>Ibid,

<sup>4</sup>Ibid

sebagai tujuan dalam pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial-baru di bidang politik. Maka, sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan “tertib politik” ini, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik (*political institutionalization*).

Huntington memaknai pelembagaan (lembaga politik) sebagai proses dengan mana organisasi dan tatacara memperoleh *nilai baku* dan *stabil*. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi dan tatacara. Menurut Huntington, *pelembagaan organisasi dan tatacara tertentu* di dalam sistem politik dapat diukur dari ukuran-ukuran: *penyesuaian diri – kekakuan, kompleksitas – kesederhanaan, otonomi – subordinasi, dan persatuan – perpecahan*, yaitu :

1. *Penyesuaian Diri dan Kekakuan*. Makin mudah menyesuaikan diri, organisasi makin tinggi tingkat pelembagaannya. Dan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri, dapat diukur dari (a) *usia organisasi*. Dan usia ini diukur dari *perhitungan kronologis* (makin tua organisasi, makin tinggi tingkat pelembagaannya); (b) *usia generasi* (makin sering suatu organisasi mampu mengatasi masalah suksesi dengan luwes, makin tinggi tingkat pelembagaannya); (c) *fungsi* (makin mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dengan mengubah fungsi, makin tinggi tingkat pelembagaannya).
2. *Kompleksitas dan Kesederhanaan*. Makin kompleks organisasi, makin tinggi tingkat pelembagaannya.
3. *Otonomi – Subordinasi*. Yaitu sejauh mana organisasi politik dan prosedur tidak tergantung dari kelompok sosial dan metode perilaku yang lain.
4. *Kesatuan dan Perpecahan*. Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, semakin tinggi tingkat pelembagaannya.

Pelembagaan politik, menurut Huntington, menentukan stabilitas sistem politik, bersama-sama dengan kualitas partisipasi politik. Dikatakannya, stabilitas politik tergantung pada hubungan (rasio) antara *derajat partisipasi politik* dan *pelembagaan politik*. Instabilitas, adalah pertanda bahwa masyarakat tidak memiliki komunitas politik sementara partisipasi politik bergerak jauh lebih cepat daripada pelembagaan politik. Masyarakat yang maju dan tertib memiliki pola pelembagaan kekuasaan yang tegas dan stabil serta selaras dengan tingkat partisipasi politiknya.

Gagasan utama tentang *konteks* pelembagaan partai politik dalam sistem politik untuk menyumbang terciptanya *political order* sebagaimana dikemukakan Huntington ini, saya ringkas dalam tabel yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis (*framework for analysis*) pelembagaan partai politik.

**Tabel 1. Analisis Pelembagaan Partai Politik Huntington**

<b>Gagasan Utama</b>	<b>Samuel P. Huntington</b>
Konteks Pelembagaan Parpol	- Tertib politik- Sistem politik- Stabilitas politik- Partisipasi politik
Pelembagaan Partai Politik	- Nilai baku.- Stabil.
Parameter Pelembagaan Parpol	Kemampuan partai politik: 1. Menyesuaikan diri (usia organisasi, usia generasi, fungsi). 2. Kompleksitas. 3. Otonomi. 4. Keterpaduan organisasi dan tatacara
Implikasi parameter pelembagaan partai politik	1. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan (tidak sebatas melaksanakan fungsi partai). 2. Diferensiasi sub-unit organisasi (hirarki – fungsional). 3. Tidak tergantung dari <i>organisasi politik</i> dan <i>metode perilaku</i> yang lain. 4. Keutuhan organisasi.
Efek implikasi parameter pelembagaan partai politik	1. Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal (stabilitas internal, demokrasi internal, konsensus). 2. Hubungan antar-partai. 3. Peran dalam sistem politik.

(Sumber: Haryanto, 1982)

Dari rumusan Huntington, semakin partai mampu menunjukkan derajat parameter pelembagaan yang tinggi, semakin melembaga partai tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal, hubungan antar-partai dan peran dalam sistem politik. Sebagai “*frame for analysis*”, darinya dapat diturunkan beberapa alat analisis pelembagaan partai politik yang lebih teknis dan terukur sehingga “apa-apa yang harus dilakukan partai politik” agar lebih melembaga akan menjadi lebih jelas.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan bagaimana kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial yang ingin diteliti secara mendalam. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu DPC PKS Kota Padang dimana peneliti

lebih memfokuskan mewawancarai informan yaitu ketua, wakil ketua dan bagian kaderisasi dan ideologi yang ada pada partai PKS Kota Padang. Teknik pemilihan informan digunakan adalah *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan yang dipilih secara sengaja dimana peneliti memilih informan dengan anggapan dan pendapat sendiri. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap paling tahu dan yang akan memudahkan peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan menetapkan kriteria- kriteria untuk dapat dijadikan informan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*) yang bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran informan. Lalu dengan dokumentasi yaitu bahan untuk memperoleh data tentang informasi, situasi, kondisi latar belakang penelitian.

Ujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, Triangulasi merupakan teknik pemeriksaankeabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. sumber data, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda Triangulasi sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan diantara informan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bersama informan triangulasi untuk mendapatkan data. Seluruh data yang didapat akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti sendiri, dan informasi emik merupakan pandangan informan. Kedua informasi ini dianalisis oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, teori- teori, pendapat-pendapat ilmiah, yang menunjang apa yang disampaikan oleh para informan, disertai dengan literatur yang ada.

### **3. HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **Rekrutmen DPD PKS Kota Padang**

Dalam melakukan rekrutmen anggota baru PKS menggunakan dua cara, yakni pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhhiyyah*) dan pola rekrutmen institusional (*al-da''wah al-, amma*). Pola rekrutmen individual berbentuk pendekatan orang per-orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. DPD PKS Kota Padang masih tetap menggunakan pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhhiyyah*), hal tersebut terlihat dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua DPD PKS Kota Padang, Gufron, sebagai berikut:

“...Berawal dari ajakan masing-masing ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) ya kan untuk TOP, nanti di TOP oleh lembaga. Iya *personal approach* juga karna ada

DPRa ini misalnya di Jati Baru dapat 10 orang nanti kita gabungkan kita training gitu kan kita kenalkan dengan ini”.

Dari wawancara tersebut, jelas ketua DPD PKS Kota Padang mengatakan bahwa pendekatan secara peribadi (*personal approach*) masih tetap dilakukan sebagai upaya rekrutmen partai PKS Kota Padang. Untuk pola rekrutmen Institusional (*al-da“wah al-, amma*) yang pada dasarnya melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS dengan bekerjasama dengan institusi- institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Sebagai temuan peneliti dilapangan terkait rekrutmen DPD PKS Kota Padang dengan pola rekrutmen Institusional (*al-da“wah al-, amma*) ialah dengan menggerakkan DPRa (Dewan Pimpinan Ranting), seperti yang diungkapkan oleh ketua umum DPD PKS Kota Padang, Gufron sbb:

“...Melalui struktur DPRa ya kan. DPRa dan DPC boleh bergabung. Dan kalau idealnya, memang masing-masing DPRa itu mengajukan dan mencari tokoh-tokoh masyarakat yang siap untuk Di TOP-kan atau di training ya kan untuk di kasih materi- materi tentang bagaimana berorganisasi bagaimana tentang ke PKS dan seterusnya kan”.

Dari wawancara tersebut, memang DPRa sebagai salah satu struktur formal PKS ditekankan untuk aktif dalam menjaring tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dan bersedia untuk selanjutnya melalui tahapan TOP (training orientasi partai). Sementara hal lainnya diungkapkan oleh kepala bidang kepanduan & olahraga DPD PKS Kota Padang, Jhon Bahrian, sbb:

“...Walaupun juga ada dari masyarakat tapi mereka udah berkecimpung di organisasi masyarakat. Contoh aja di ibuk-ibuk ya, disitu kita ada namanya forum ekonomi keluarga, disitu diarahkan atau diajarkan juga. Biasanya kalau pemuda-pemuda diarahkan pada Kepanduan ini seperti itu”.

Memang tidak secara spesifik dikatakan oleh beliau mengenai organisasi atau kelompok masyarakat mana saja yang digunakan sebagai langkah melakukan rekrutmen partai. Namun, ketika peneliti menanyakan terkait rekrutmen di DPD PKS Kota Padang, beliau menyebutkan untuk ibu-ibu seperti forum ekonomi keluarga. Dimana melalui forum tersebut, partai mengarahkan dan mengajarkan tentang nilai-nilai kepartaian yang dimiliki oleh PKS. Meski, untuk tingkatan pemuda, beliau tidak menyebutkan secara spesifik organisasi kepanduan apa saja yang mereka miliki dan gunakan dalam upaya melakukan rekrutmen kader partai.

Menanggapi terkait pola rekrutmen Institusional (*al-da“wah al-, amma*) yang dilakukan oleh PKS, Andri Rusta, menyatakan, sbb:

“...Kalau dari kampus tu biasanya dari FKI Rabbani, nanti masuk ke KAMMI, nah dari KAMMI ke PKS, kan gitu alurnya tu. Nah itu kaderisasi yang dibangunnya dari awal”.

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa dalam melakukan rekrutmen kader, PKS memang menggunakan pola rekrutmen Institusional (*al-da'wah al-, amma*). Artinya, DPD PKS Kota Padang benar-benar menggunakan atau melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS dengan bekerjasama dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Dari berbagai jawaban yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada narasumber dan triangulasi, terlihat bahwa DPD PKS Kota Padang menggunakan pola rekrutmen individual (*al-da'wah al fardhhiyyah*) dan pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al-, amma*). Pola rekrutmen tersebut memang menjadi pola umum yang digunakan PKS dalam merekrut calon kader partainya, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Burhanuddin Muhtadi melalui bukunya “Dilema PKS: Suara dan Syariah” yang telah peneliti kutip diawal pembahasan terkait rekrutmen DPD PKS Kota Padang.

### **Analisis Kaderisasi DPD PKS Kota Padang**

Kaderisasi atau pengkaderan adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi secara lebih bagus. Dalam hal kaderisasi, PKS memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan partai lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Akmal Syafar, selaku ketua bidang kaderisasi DPD PKS Kota Padang melalui wawancara dengan peneliti:

“...Saya kira kaderisasi ini bagi partai politik atau organisasi apapun tentu sesuatu yang penting dan yang membedakan PKS dengan yang lain kita selalu memikirkan keberlanjutan dari partai ini. Karna partai ini tidak bergantung kepada tokoh dan karena tokoh bisa jadi akan tua dan meninggal jadi tidak tergantung pada figur dan semoga semua partai seperti itu dan semua organisasi seperti itu”.

Melalui kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa PKS selalu mengutamakan kaderisasi, bukan hanya mengandalkan tokoh. Sehingga berjalannya kaderisasi partai pada PKS menjadi hal yang dianggap penting dan mutlak yang harus dilakukan untuk keberlanjutan partai. Kuatnya sistem kaderisasi di DPD PKS juga diakui oleh Andri Rusta yang diungkapkan kepada peneliti melalui wawancara yang peneliti lakukan, beliau mengatakan:

“...Karna PKS kan sistem kaderisasi partainya memang beda dengan partai yang lain, makanya dia cenderung disebut partai inklusif karna dia sistem kaderisasinya pakai liqo' dan pakai pengajian lainnya gitu kan”.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa memang terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang dimiliki oleh PKS sebagai bentuk kaderisasinya. Terdapat berbagai tingkatan juga untuk level kaderisasi yang dimiliki oleh PKS. Hal tersebutlah yang membuat PKS menjadi berbeda dengan partai lainnya. Terkait bagaimana kaderisasi yang ada pada DPD PKS Kota Padang terhadap kader yang dimiliki oleh PKS, Gufron, menyatakan, sbb:

“...Ada TOP 1, TOP 2. Nanti kalau sudah TOP lanjut kepada TRP namanya yaitu Taklim Rutin Partai. Jadi itu proses bagaimana memahami situasi organisasi situasi apa namanya visi dan misi jangan sampai dia bergabung di PKS tapi dia tidak tau arah mau kemana. Jelas kita berkhitmat untuk ummat, ternyata dia berkhitmat untuk dirinya sendiri kan nggak mungkin gitu”.

Dari pernyataan ketua DPD PKS Kota Padang tersebut, terlihat bahwa kader harus menjalani TOP (training orientasi partai) 1 dahulu, kemudian dilanjutkan dengan TOP 2. Setelah menyelesaikan proses training orientasi partai (TOP) tersebut, selanjutnya akan memasuki taklim rutin partai (TRP). Hal tersebut dilakukan agar kader memahami situasi organisasi maupun visi dan misi organisasi, dalam hal ini ialah partai PKS. Sebagai kepala bidang kependuan & olahraga DPD PKS Kota Padang, Jhon Bahrian, mengatakan bahwa:

“...Penyiapan PKS pada kadernya sebenarnya diawali dari ada program namanya TOP (Training Orientasi Partai) jadi setiap orang yang mau bergabung itu di training awal dulu yaitu mulai dari penjabaran apa itu PKS sampai setelah itu di lanjut ke yang namanya TRP nah ini rutin jadi dilakukan setiap sekali seminggu kemudian juga ada kegiatan sebulan sekali nah itu”.

Kutipan dari hasil wawancara peneliti tersebut, menjelaskan bahwa training orientasi partai (TOP) terdiri dari penjabaran terkait apa itu PKS, kemudian taklim rutin partai (TRP) tersebut berupa kegiatan rutin yang dilakukan seminggu sekali dan kemudian terdapat juga kegiatan dengan rentang waktu sebulan sekali.

Jika dianalisis terkait hasil wawancara yang peneliti dapatkan berdasarkan pendidikan politik partai menurut Rochyat Harun dan Sumarsono, maka training orientasi partai serta taklim rutin partai tersebut termasuk kedalam jenjang pertama pendidikan yang diarahkan untuk pemahaman arti berorganisasi, serta memantapkan dedikasi.

Seperti yang disampaikan oleh ketua DPD PKS Kota Padang tersebut, dimana training orientasi partai dan taklim rutin partai merupakan proses bagaimana memahami situasi organisasi, visi dan misi. Sehingga, diharapkan jangan sampai orang yang bergabung di PKS tidak mengetahui arah mau kemana. Kemudian, training orientasi partai juga mampu membuat kader menjadi berdedikasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh ketua DPD PKS Kota Padang, Gufron, sbb:

“...Jadi pertama ada TOP pola rekruting ya kan, begitu rekruting dikondisikan dilatih dinaikkanawasannya dikuatkan pemahamannya sehingga dia punya energi yang besar untuk bisa bergerak. Kemudian setelah seperti itu baru kita gerakkan/mobilisasi dan itulah yang kemudian Pak Dr Asrinaldi itu bilang kader PKS itu militan karna memang dibekali dengan ilmu kan ilmu kan nurul/cahaya dan dengan cahaya itulah dia bergerak”.

Terlihat melalui kutipan wawancara tersebut bahwa training orientasi kepartaian mampu menjadi sarana pemantapan dedikasi seperti yang diungkapkan oleh Rochyat Harun dan Sumarsono dalam konsep pendidikan politik partai.

Dari semua kutipan wawancara yang peneliti lakukan, memang tidak terlihat bagaimana sistem kaderisasi Tarbiyah ditonjolkan. Pada dasarnya, ciri khas gerakan tarbiyah tersebut adalah membentuk halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) kecil yang terdiri dari lima hingga dua belas orang anggota (mutarabbi) dibimbing oleh seorang murabbi bahkan dalam realisasinya satu atau dua orang anggota pun jadi untuk dikader dan dibina sehingga memiliki wawasan keislaman yang kuat.

Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide- idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya.

Sistem kaderisasi tarbiya yang pada umumnya diterapkan kepada kelompok mahasiswa menjadi tidak ditemukan pada penelitian ini dikarenakan narasumber yang ada awal wawancara menyatakan tidak bermain politik diarah kampus, namun lebih kepada kalangan masyarakat, seperti hasil wawancara peneliti dengan narasumber Gufron, sebagai berikut:

“...Sekarang karena kita sudah berdiri sebagai partai politik, partai politik kan dilarang di kampus kan? Ya kita bergerak di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan mengadakan apa namanya bakti social dan di bakti social nanti juga akan di cari namanya TOP dan TRP lalu TRP lanjutan terus karna sudah bulanan sudah ini kan ada tokoh- tokohnya”.

Dari wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa narasumber yang dalam hal ini ialah ketua DPD PKS Kota Padang lebih menekankan kepada kaderisasi formal partai dengan bergerak ditengah-tengah masyarakat. Sasaran rekrutmen yang diarahkan kepada masyarakat tersebut tentu membuat pola kaderisasi yang ditempuh berbeda dengan yang akan diterapkan kepada kelompok lainnya, termasuk kepada kelompok mahasiswa yang memang dikenal efektif dikader melalui pola tarbiyah.

#### 4. KESIMPULAN

Keberhasilan PKS di daerah ditandai dengan kemenangan pemilihan kepala daerah, terutama di Kota Padang Di Kota Padang dengan mayoritas muslim menjadikan PKS sebagai partai islam yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Tidak hanya keberhasilan dalam pemenangan walikota, PKS juga menunjukkan keberhasilannya dalam pemilihan legislatif di Kota Padang dengan perolehan suara 68.241 pada Tahun 2004, 39.738 suara pada tahun 2009, dan 39.022 suara pada tahun 2014. Pencapaian tersebut diperkuat dengan suksesnya PKS dalam menempatkan Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari bagusnya sistem kaderisasi yang dimiliki oleh PKS sebagai sebuah partai kader. Dalam melakukan rekrutmen anggota baru PKS menggunakan dua cara, yakni pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhiyyah*) dan pola rekrutmen institusional (*al-da''wah al-,amma*). Berdasarkan pada hasil dan temuan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa DPD PKS Kota Padang menggunakan pola pola rekrutmen individual (*al-da''wah al fardhiyyah*) dan pola rekrutmen institusional (*al-da''wah al-,amma*). Pola rekrutmen tersebut memang menjadi pola umum yang digunakan PKS dalam merekrut calon kader partainya.

Kemudian terkait kaderisasi, PKS memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan partai lainnya. Secara umum, pengkaderan di kalangan PKS terdiri dari tiga jenis, yakni Tarbiyah, pengkaderan underbrow PKS, dan yang terakhir adalah pengkaderan formal kepartaian PKS sendiri. Berdasarkan temuan dan hasil analisis peneliti terhadap sistem kaderisasi DPD PKS Kota Padang, seperti yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, bahwa DPD PKS Kota Padang lebih menekankan kepada kaderisasi formal kepartaian dengan bergerak ditengah-tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnedi Yarmen, kutipan di dalam Jurnal; Nurman, S. dan Al Rafni, *Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004*, Jurnal Demokrasi, Vol. IV No. 2 Tahun 2005.
- Burhanuddin Muhtadi, (2012) : *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta, 2012.
- Imadudin Rahmat (2012), *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*

Imadudun rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: Lkis, 2008)

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Miriam Budiardjo, 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Prs, 2012.

Rochayat Harun, Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Taupik Azhari (2014): Skripsi: *Pola Kaderisasi Partai Golkar di Kota Pematang Siantar*